

## “SAYA INDONESIA, SAYA PANCASILA” Islamisasi, Konteks, dan Diskursus Pancasila Pasca Rezim Otoriter

**Wahyudi Akmaliah**

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan  
dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)*



### **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan Pancasila yang kembali sebagai diskursus pasca rezim Orde Baru, khususnya menjelang 20 tahun pasca kejatuhan Soeharto dalam pemerintahan Jokowi. Terkait Pancasila yang kembali menjadi diskursus, ada tiga pertanyaan yang saling terkait yang diajukan dalam artikel ini; Konteks apa yang menyebabkan Pancasila relatif terabaikan pasca kejatuhan rezim Orde Baru? Mengapa Pancasila kembali menjadi diskursus penting sebagai landasan berbangsa dan bernegara di era pemerintahan Jokowi? Bagaimana menempatkan Pancasila dan diskursus wajah nasionalisme Indonesia di tengah tiga teori yang mengemuka; sekularisasi, nasionalisme religius, nasionalisme berketuhanan? Dalam menjawab ketiga hal tersebut, artikel ini berargumen bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta telah menjadi ruang yang membuat kelompok konservatif Islam menguatkan diri di publik nasional. Selain kehadiran kelompok konservatif yang menguat di ruang publik dan adanya aliansi mereka dengan predator politik untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta, konteks pemerintahan Susilo Bambang Yudiono sebelumnya sebagai prakondisi, membuka jalan kelompok-kelompok tersebut juga merupakan penjelasan yang tidak bisa diabaikan.

Kata Kunci: *Pancasila, Islamisasi, Konservatisme, Pragmatisme Politik, Ahmadiyah*

## Pengantar

Kurun waktu Tahun 2017 Pancasila menjadi wacana publik yang kembali diperbincangkan. Hal ini tampak dengan munculnya video Presiden Joko Widodo (biasa disebut dengan Jokowi) menjelang peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni yang diunggah Sekretaritan Negara Republik Indonesia pada 29 Mei 2017 di kanal *Youtube*. Dalam video tersebut, dengan latar belakang bendera merah putih, dalam posisi duduk, Jokowi berbicara, “Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. perekat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi. Saya Indonesia. Saya Pancasila”. Video ini kemudian menyebar dan menjadi perbincangan (*trending topic*) di media sosial dengan tagar *#SayaIndonesiaSayaPancasila* dan visualisasi gambar merah putih dan tulisan. Padahal, sebelumnya, Pancasila menjadi ideologi bangsa yang kerap kali mulai diabaikan. Salah satu tanda pengabaian ini adalah tidak adanya kewajiban untuk hormat kepada bendera merah putih saat upacara bendera. Peniadaan kewajiban ini dilakukan karena, mereka menganggap bahwa penghormatan kepada bendera itu haram dan tindakan musyrik, menyekutukan diri selain kepada Allah. Ini terjadi pada Sekolah Dasar al Albani Matesih dan Sekolah Menengah Pertama al Irsyad Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Penolakan untuk hormat kepada Bendera Merah Putih ini juga terjadi kepada 7 Aparat Sipil Negara (ASN, sebelumnya PNS) yang berprofesi sebagai guru di lingkungan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Karanganyar, Jawa Tengah ([www.solopos.com](http://www.solopos.com), 8 Juni 2011).

Pengabaian ini memiliki konteks peristiwa yang melatar belakanginya, yaitu penafsiran tunggal Pancasila di bawah rezim Orde baru. Atas nama asas ideologi tunggal Pancasila sebagai dasar dan fondasi seluruh kehidupan dan berbangsa masyarakat Indonesia, rezim Orde Baru mengatur dan mengontrol setiap individu, komunitas, dan elemen masyarakat lainnya. Akibatnya, jika ada individu dan organisasi yang berbeda dengan versi tunggal Pancasila menurut rezim Orde Baru, mereka tidak hanya diamankan dalam bentuk pemenjaraan, melainkan juga melalui proses pembersihan. Representasi penindasan rezim Orde Baru ini terlihat dalam dua peristiwa yang mengakibatkan sejumlah masyarakat Muslim di penjara, dibunuh, dan mengalami proses stigma. Dua peristiwa itu adalah Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989), di mana kelompok masyarakat Islam saat itu dianggap melawan asas tunggal Pancasila dan ingin mendirikan negara Islam (Akmaliah, 2016). Pemaknaan tunggal atas tafsir Pancasila inilah yang kemudian menciptakan trauma, khususnya sebagian masyarakat Islam. Trauma ini yang kemudian berimbas kepada bentuk-bentuk pengabaian di tengah transisi demokrasi Indonesia setelah kekuasaan represif rezim Orde Baru selama 32 tahun.

## **Islamisasi, Kekerasan, dan Pragmatisme Politik**

Kekuasaan despotik rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tidak hanya menguatkan basis kekuatan negara, melainkan juga jaringan melalui birokrasi dan elit politik yang direalisasikan melalui lembaga dan regulasi yang dibuat. Ketika kekuatan ini jatuh memunculkan kekosongan kekuasaan dalam transisi demokrasi. Transisi ini yang memunculkan ketegangan, negosiasi, dan kemunculan pola baru dalam peta politik di Indonesia di tengah melemahnya posisi negara. Lemahnya posisi negara terlihat dengan munculnya kekerasan dan kerusuhan atas nama etnik dan agama dari tahun 1998-2003 dan gerakan memisahkan diri dari Republik Indonesia, seperti kerusuhan Mei di Jakarta, Jogja, dan Solo (1998), Konflik Islam-Kristen di Maluku dan Poso, Kekerasan anti etnik Madura di Sambas dan Sampit, GAM di Aceh dan Papua Merdeka di Papua. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran Indonesia akan menjadi negara gagal (Tadjoeddin, 2014: 1-2). Memang, transisi demokrasi ini bisa diatasi dengan baik dan Indonesia di tengah menguatnya institusi-institusi negara dan non negara di Indonesia. Namun, transisi ini memunculkan tiga kekuatan baru. Pertama, pengorganisasian oligarki politik warisan era rezim Orde Baru dengan menyesuaikan diri kepada sistem politik pasca reformasi (Robinson dan Hadiz, 2004). Kedua, munculnya kekuatan elit politik lokal dengan adanya desentralisasi yang memungkinkan setiap daerah bisa

mengelola daerahnya sendiri melalui Undang-Undang Otonomi Daerah yang membuka kembali kekuatan lama dan baru (Nordholt dan Klinken, 2011). Ketiga, kekuatan kelompok-kelompok Islam yang direpresi sejak rezim Orde Baru dan kemunculan organisasi-organisasi keagamaan baru dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik berbasis Islam ataupun bernegosiasi dengan partai-partai sekuler (Buehler, 2016).

Kekosongan kekuasaan ini berdampak dua hal yang berjalan secara kontradiktif dalam masyarakat Islam di Indonesia. Pertama, wajah baru Islam. Seiring dengan pertumbuhan populasi di Indonesia, wajah Islam di Indonesia memunculkan ormas baru di luar ormas Islam yang sudah mapan di Indonesia, seperti Persis, NU, dan Muhammadiyah (Hefner, 2016). Organisasi-organisasi Islam ini yang memiliki irisan dan keterkaitan dengan organisasi Islam yang direpresi pada era Orde Baru serta memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Misalnya, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan organisasi Islam lainnya yang muncul di pelbagai daerah. Kedua, kekalahan Partai Politik Islam. Momentum Reformasi ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok Islam untuk mendirikan Partai Islam di luar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah terbentuk sejak era Orde Baru. Partai ini memiliki irisan yang kuat dengan organisasi Islam sebelumnya, yaitu Masyumi dan

Gerakan Tarbiyah yang mengambil inspirasi Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Misalnya, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara itu, dengan afiliasi kultural Islam, partai “moderat” lahir dalam rahim kader-kader Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, kekuatan wajah Islam dan partai Islam ini tidak berjalan seiring. Meskipun menyuarakan syariat Islam sebagai platform politik, partai Islam ini mengalami kekalahan dan tidak memiliki suara yang signifikan dalam pemilu, mulai dari tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sebaliknya, partai-partai sekuler yang justru memenangkan pertarungan dari empat kali pemilu tersebut.

Bagi Buehler (2016: 116-118), kegagalan partai politik Islam ini diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk menyediakan sumber-sumber politic (*political resources*), yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, fragmentasi politik lokal. Faktor sejarah dan politik aliran memegang peran dalam membentuk imajinasi dan juga gambaran pemilih. Berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana politik aliran begitu kuat, di Jawa Barat masyarakat Muslim dibentuk dan mengikuti suara pemimpin keagamaan, dalam hal ini Kiai dan Pesantren. Sementara itu, Kiai memiliki jaringan dan agensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini, alih-alih memiliki jaringan elit politik yang kuat di wilayah lokal, partai-partai Islam justru miskin

dalam persoalan membangun hubungan yang erat dengan para kiai dan pondok pesantren. Lemahnya jaringan di aras lokal ini disebabkan oleh faktor kedua, yaitu proses pemiskinan Orde Baru terhadap PPP dan hilangnya otoritas partai Islam pasca rezim Orde Baru. Sebagaimana diketahui, pemerintah Suharto hanya membolehkan tiga partai politik, di mana Islam diwakili oleh PPP. Agar tidak menjadi partai yang kuat, Orde Baru kemudian menggerogoti partai ini yang memiliki afiliasi dengan gerakan Islam seperti Darul Islam di Sulawesi. Banyak dari para kiai kemudian memilih untuk masuk dan menjadi penyokong Golkar. Saat rezim Orde Baru tumbang, PPP kehilangan otoritasnya sebagai partai Islam di tengah munculnya dua partai Islam yang lain dengan aspirasi politik yang sama. Di sisi lain, mesin politik dalam aras lokal dikuasai oleh partai-partai sekuler lama seperti Golkar dan PDI-P.

Akibat ketidakmampuan ini, dengan pengalaman dan agensi jejaring lokal serta kapitalisasi ekonomi yang kuat partai sekuler seperti Golkar dan PDI-P justru yang paling siap dalam bernegosiasi dengan kelompok-kelompok Islam di daerah. Untuk mendapatkan suara dalam pemilu, mereka kemudian mengajukan dan kemudian meloloskan perda-perda Syariah sebagai aspirasi kelompok-kelompok Islam ini. Sebagaimana dicatat oleh Kamil (2008:1), yang dikutip oleh Akmaliah dan Pribadi (2013: 139) bahwa setidaknya ada 22 kota/kabupaten, Perda Syariah, seperti di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bulukumba,

Sulawesi Selatan, Bima, Nusa Tenggara Barat, Indramayu, Cianjur, dan Tasikmalaya, Jawa Barat, dan di Kota Tangerang, Banten. Lebih jauh, dalam kalkulasi perhitungan Robin Bush ada 78 Perda di 52 dari 470 kabupaten atau kota di Indonesia. Meskipun dalam kenyataannya perda Syariah ini dalam sistem pemerintahan lokal Indonesia hanya diberlakukan di 21 persen propinsi dan sekitar 10 persen kabupaten dalam dekade terakhir (Buehler, 2011: 75). Akhirnya, ketidakmampuan ini berimbas kepada keterbukaan *platform* politik dari Partai Islam sendiri yang kemudian menjadi agak lebih moderat, di mana tingkat perbedaannya relatif sedikit dengan partai-partai sekuler yang ada.

Kondisi ini menyebabkan involusi komitmen politik yang awalnya bertujuan untuk kebaikan publik menjadi kepentingan individu dan partai politik. Dengan kata lain, selama didukung oleh konstituen, partai politik akan bernegosiasi untuk sama-sama memenangkan kepentingannya. Di sini, pilihan rasional dan pragmatisme menjadi satu hal yang dikedepankan. Kondisi ini kemudian berimbas kepada komitmen partai politik, khususnya individu yang memegang jabatan publik penting di daerahnya, baik sebagai kepala daerah maupun DPR/MPR di tingkat daerah dan pusat, dalam menjaga kebaikan dan kepentingan publik. Perihal ini tercermin dari tindakan kekerasan dari paramiliter yang mengatasnamakan Islam. Alih-alih menemukan jalan keluar

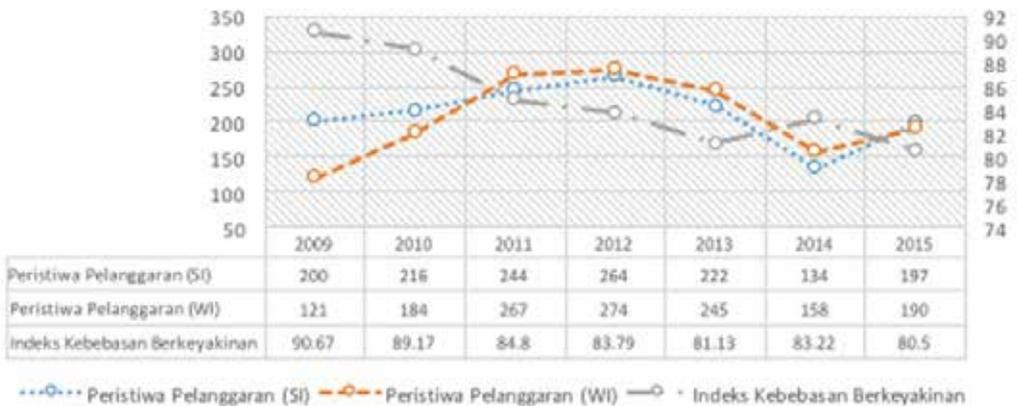
dan penyelesaian yang berpihak kepada korban kekerasan atas nama agama, khususnya kekerasan yang menimpa kelompok Islam, seperti Ahmadiyah dan Syiah, untuk memenuhi suara konstituen, partai politik yang masuk dalam pemerintahan, lokal dan nasional justru membuat kebijakan kontra-produktif yang mendorong terjadinya kekerasan melalui aturan yang dibuat. Hal ini tercermin pada era SBY yang membuat aturan SKB Tiga Menteri No. 3 Tahun 2008 yang justru menjadi dalih paramiliter atas nama Islam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok Ahmadiyah.

Bahkan pola pembiaran ini dan minimnya upaya penyelesaian kasus kekerasan atas nama agama ini terlihat dari tiga hasil survei lembaga seperti Wahid Institute (WI), Setara Institute (SI), dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Meskipun masing-masing lembaga ini memiliki cara basis pengukuran sendiri, di mana WI dan SI menggunakan pengukuran berbasis peristiwa dan IDI berbasis indeks Kebebasan Berkeyakinan. Namun, ketiga survei itu justru saling melengkapi memiliki kecenderungan trend yang sama. Hal ini terlihat dari pemaparan yang dikemukakan dengan baik oleh Rapsadi (2017: 108-109). Melalui Grafik yang dibuatnya ini, saya menjelaskan lebih rinci trend kenaikan kekerasan tersebut. Pada tahun 2009, SI mencatat bahwa ada 200 pelanggaran, dan WI menyebutkan 121, serta IDI memberikan indeks Kebebasan Berkeyakinan dengan nilai 90.67 %.

Namun, pada tahun 2010, trend ini meningkat sekitar 2-4 % yang berakibat pada penurunan indeks IDI, 89.17 %. Trend kekerasan ini mengalami peningkatan secara konsisten pada tahun 2011 dan mengalami puncaknya sampai pada tahun 2012, di mana secara prosentase jadi sekitar 60-70 persen; SI menyebutkan 264 pelanggaran dan WI 274 pelanggaran, dengan indeks IDI menjadi hanya 83.79 %. Secara berlahan, trend kekerasan ini kemudian menurun pada tahun 2013 sekitar

20-40 %, di mana indeks IDI justru menempati nilai 81.13 %. Signifikansi trend kekerasan ini menurun tajam pada tahun 2014, jumlah Peristiwa Kekerasan tercatat SI menjadi 134 kasus dan WI mencatat hanya 158, dan IDI indeksnya meningkat sekitar 2 persen, 83.22. Trend ini kemudian mulai mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015 dengan kisaran 40-60 %, di mana IDI-nya mengalami titik terendah dari kurun 7 tahun tersebut, 80.5 %.

Perbandingan Peristiwa Pelanggaran dan Indeks KBB  
2009-2015



Grafik 1 (Sumber: Irsyad Rafsadi, 2017)

bisa melihat bahwa terjadi kenaikan secara signifikan trend kekerasan di era SBY dan mulai mengalami penurunan saat pemerintahan Jokowi. Meskipun, pemerintahan Jokowi harus dilihat trendnya selama 5 tahun saat ia menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hasil survei ini, penjelasan analitik yang diberikan oleh Fealy (2016: 126) bisa

memberikan gambaran secara baik mengapa politik intoleransi meningkat di era SBY. Meskipun memiliki komitmen terhadap isu toleransi, SBY menghindari kebijakan yang kontroversial mengenai isu-isu Islam. Apalagi, sejak awal, ia sudah diingatkan oleh para penasihat internalnya, di mana semua Presiden Indonesia harus berpikir 10 kali sebelum

mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan agama. Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan keributan. Selain itu, posisi SBY sendiri sangat rentan di tengah minimnya kredibilitasnya mengenai isu-isu Islam, di tengah ketidakmampuannya untuk berbicara bahasa Arab, latar belakang pendidikan agama Islam, dan tidak tergolong orang yang taat terhadap agama. Kondisi ini diperparah dengan rumor yang dimunculkan oleh media-media Islam di mana isterinya, Ani Yudhoyono adalah seseorang yang beragama Kristen. Di sisi lain, sebagai figur yang dianggap sebagai ahli strategi, ia membaca hasil survei bahwa mendukung Ahmadiyah merupakan kebijakan yang tidak populer dan justru bisa berisiko kepada dirinya sendiri. Sejumlah argumen itulah yang membuat SBY sebisa mungkin untuk menghindari diri mengeluarkan kebijakan yang bisa membuatnya dianggap sebagai kekuatan anti Islam di masyarakat.

### **Dampak Pilkada DKI: Membendung Konservatisme dengan Pancasila**

Pemilihan Presiden pada tahun 2014, dengan hanya menghadirkan dua pasangan calon, tidak hanya mempertajam suhu dan ketegangan politik, melainkan juga memperuncing masyarakat Indonesia menjadi terfragmentasi kepada dua kelompok, mendukung Jokowi atau Prabowo. Selama proses kampanye, hoax sebagai media untuk menjatuhkan lawan politik mulai muncul dan berkebar, baik

itu secara *online* maupun *offline*. Alih-alih hoax ini menimpa kedua pasangan calon, sebaliknya, justru hanya pasangan Jokowi-Kalla yang mendapatkan serangan fitnah dan berita bohong tersebut. Secara *online*, informasi terkait dengan latar belakang Joko Widodo sebagai keluarga yang tidak jelas dan bahkan dianggap sebagai keturunan PKI terus berkebar di media social. Secara *offline*, melalui tabloid *Obor Rakyat*, selain membuat fitnah terhadap PDI-P, media tersebut memberitakan Jokowi melakukan korupsi pengadaan Transjakarta dan dianggap sebagai boneka yang bisa dikendalikan oleh Megawati. Di tengah hoax yang begitu kencang, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla akhirnya bisa mengalahkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan selisih 13 % ini, dengan perincian, kubu Jokowi mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara dan kubu Prabowo meraih 46,85% atau 62.262.844 suara. Perhitungan resmi KPU ini kemudian membuat Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo (bbc.com, 22 Juli 2014).

Namun, bukan berarti mesin hoax berhenti hingga di sini. Dengan menggunakan sentimen keislaman, di mana sebelumnya, kubu Prabowo didukung oleh kebanyakan kelompok Islam modernis, dan membangun asumsi bahwa Jokowi sebagai anti-Islam, banyak dari akun-akun media sosial ini terus mereproduksi kebencian kepada pemerintahan dan kebijakan Jokowi. Reproduksi kebencian dengan berita fitnah dan bohong ini kemudian melahirkan mikro-selebriti di media

sosial. Salah satu yang paling terkenal adalah Jonru. Dengan kemampuan menulis, ahli IT, dan berpengalaman mengelola website sekaligus sebagai blogger, Jonru mengerti bagaimana memainkan sentimen keislaman dengan terus memproduksi kebencian dengan postingan berita ataupun tulisan terkait dengan posisi Jokowi (Akmaliah, 2017a). Namun, fitnah tersebut justru dijawab oleh Jokowi dengan sejumlah prestasi melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di pelbagai daerah. Sebelum membangun infrastruktur, stabilitas politik juga perlu dikedepankan. Selama satu tahun pemerintahannya (2014-2015), Jokowi membangun aliansi politik dengan merangkul partai politik yang sebelumnya berseberangan karena mendukung kubu Prabowo, seperti PAN, Golkar, dan PPP.

Tentu saja, mengandalkan postur anggaran APBN untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selain mencari pilihan pinjaman uang kepada donor asing, mengevaluasi penggunaan APBN secara lebih detail merupakan pilihan yang harus diambil. Ini digunakan untuk menambah amunisi keuangan dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu dana yang kemudian dipotong dan mengalami efisiensi penganggaran adalah Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukkan untuk ormas dan LSM, (Kompas.com, 22 Desember 2014). Banyak dana Bansos yang kemudian diberikan oleh ormas dan LSM, ini digunakan oleh DPRD dan juga kepala daerah untuk mendukung

kebijakan yang dibuat ataupun ikut mensukseskan agar memilih pasangan tertentu saat Pilkada berlangsung. Hal ini yang ditegaskan sendiri oleh Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Ia tidak mau agar terpilih kembali menjadi gubernur harus mendanai ormas. Dengan kata lain, selama ini, dana bansos menjadi alat transaksi antara predator politik dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan etnik untuk mencapai tujuan tertentu. Ini tercermin dari temuan Indonesia Budget Center (IBC) yang menemukan dugaan penyelewengan APBD DKI Jakarta untuk pembiayaan dana kampanye Fauzi Bowo saat menjelang Pilkada DKI 2012. Dari investigasi dan verifikasi dokumen IBC, ada 16 lembaga penerima hibah dan 45 lembaga penerima bantuan sosial, tercatat ada penggunaan dana sebesar Rp 66 miliar yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Dari total jumlah tersebut, yaitu Rp 17,14 miliar, telah terindikasi diterima oleh ormas pendukung dan penyumbang dana dalam kampanye Fauzi-Nachrowi (Kompas.com, 25 September 2014).

Penghentian dana bansos dan, adanya perubahan struktur dalam institusi pemerintah, khususnya terpilihnya Tito Karnavian yang menggantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri, relatif mengurangi aksi kekerasan atau demonstrasi yang dilakukan oleh paramiliter dengan jubah agama, seperti FPI dan Forum Umat Islam (FUI) kepada kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Dengan

melihat kembali tiga hasil survei bisa terlihat bahwa trend kekerasan menurun tajam pada tahun 2014. Meskipun pada tahun 2015 terjadi kenaikan. Terkait dengan penurunan ini berbanding lurus dengan hasil observasi dan wawancara saya di dua daerah, Tasikmalaya di Jawa Barat dan Bangil di Jawa Timur pada pertengahan bulan Mei 2017. Dari beberapa informan yang saya dan Tim Unggulan LIPI Ketahanan Sosial wawancarai, mereka menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 terjadi penurunan dan bahkan tidak adanya tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Bangil dan Desa Wanasigra, Tasikmalaya. Salah seorang informan Ahlul Bait Indonesia (ABI) Jawa Timur mengatakan bahwa kesigapan Kapolres Bangil beserta jajarannya dalam menjaga acara-acara keagamaan yang diadakan oleh ABI adalah alasan utama mengapa tindakan kekerasan di Bangil tidak terjadi. Bahkan provokasi yang sebelumnya menguat dengan kencang relatif menjadi lebih sepi. Sementara itu, di Desa Wanasigra, di mana banyak terdapat anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), salah seorang tokoh penting IJABI Jawa Barat menjelaskan situasi tersebut dengan sarkasme. Menurutnya, saat kekerasan sektarian begitu meningkat, mereka memiliki semacam sistem alarm (*alarming sytem*) terkait kapan akan diserang dan *digebuk*. Namun, sejak tahun 2014, dengan adanya pergantian presiden justru serangan dan kekerasan yang ditargetkan ke rumah-rumah warga JAI tidak terjadi.

Namun, sejak awal tahun 2016, situasi politik nasional mulai memanas, khususnya menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Menggantikan Jokowi sebagai Gubernur, di mana sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok menunjukkan kinerja yang memuaskan, baik dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta sistem birokrasi pemerintahan DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik. Survei ini dilakukan pada 12-20 Januari 2017, menggunakan metode *Staratified Multistage Random Sampling* dengan cara tatap muka ke 808 responden. Data responden asli yang dianalisis ini sebesar 697 orang, di mana *Margin of Error* 3,8 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei itu menunjukkan bahwa 75 % warga Jakarta sangat puas atas kinerja Ahok yang kemudian berpasangan dengan Djarot (Tirto.id, 26 Januari 2017). Dengan jumlah sebesar itu, relatif sulit untuk menumbangkan Ahok-Djarot, apalagi jika menawarkan program kerja dan janji-janji politik yang berbeda melalui proses kampanye. Ini karena, ada banyak program melalui kinerja prima telah dilakukan oleh Ahok-Djarot dan masyarakat Jakarta merasakannya.

Meskipun demikian, Ahok memiliki dua fakta yang oleh lawan politiknya bisa dijadikan kambing hitam dan titik lemah, Tionghoa dan Kristen. Namun, di tengah warga Jakarta yang beragam, kehidupan urban, dan tingkat literasi lebih baik, dua identitas (agama

dan etnik) awalnya tidak menjadi persoalan. Ini karena, dengan alasan pragmatisme politik, masyarakat Jakarta lebih memilih orang yang mau bekerja membangun Jakarta. Namun, pidato Ahok pada 27 September 2016, dengan durasi 1 jam, saat melakukan peninjauan program pemberdayaan budi daya kerapu menjadi celah musuh politiknya untuk menghantam atas nama isu penodaan agama. Dalam pidato itu, Ahok, salah satunya, menjelaskan kelanjutan program tersebut walaupun ia satu waktu tidak terpilih lagi menjadi Gubernur, “Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh *nggak* apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok,” (bbc.com, 17 November 2016). Alih-alih yang muncul adalah nada kemarahan, dalam pidato tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Nurkholish, orang yang merekam pidato tersebut, saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 24 Januari 2017, banyak dari masyarakat justru merasa senang. Bahkan banyak warga yang saat itu hadir dalam pidato tersebut bertepuk tangan (bbc.com, 24 Januari 2017).

Namun saat pidato itu diunggah Pemerintah DKI ke kanal Youtube

sebagai bagian dari transparansi, justru menjadi ruang amunisi baru untuk menghantam. Orang yang bisa melihat celah itu dengan sangat baik adalah Buni Yani. Melalui akun facebooknya, ia mengunggah video rekaman tersebut yang sudah terpotong pada 6 Oktober 2016 dengan memberikan judul “Penistaan Terhadap Agama?”. Ia kemudian menuliskan transkripsi video tersebut dengan memotong kata “pakai”. Ia menuliskan ‘karena dibohongi Surat Al Maidah 51’ dan bukan “karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51’, sebagaimana transkripsi aslinya. Video ini menjadi viral dan menyebar di pelbagai platform media sosial. Akibat dari video tersebut, FPI, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas Islam lainnya melaporkan Ahok ke kepolisian. Bertolak dari sini, aksi demonstrasi untuk memenjarakan Ahok terus dilakukan hingga ia menjadi tersangka pada 16 November 2016. Upaya untuk menjegal Ahok pun semakin kuat. Ini karena, meskipun ia dijadikan tersangka ia akan tetap bisa mengikuti Pilkada DKI dan kemungkinan bisa memenangkannya dengan tingkat kepuasan yang tinggi tersebut. Aksi-aksi demonstrasi yang sebelumnya kecil itu kemudian makin membesar. Hal ini terlihat dalam dua demonstrasi 212 dan 411.

Tentu saja, dua demonstrasi tersebut bukanlah aksi yang berjalan spontan, melainkan terencana dengan adanya dukungan finansial yang kuat. Ini karena, setelah dua demonstrasi tersebut, dan dilanjutkan dengan rententan

demonstrasi yang lain, jumlah peserta aksinya tidak sebanyak dua demonstrasi tersebut. Selain itu, satu hal yang dilihat juga adalah kelompok jejaring Saracen yang cukup efektif dalam memproduksi hoax dalam Pilkada DKI Jakarta sehingga menginspirasi orang untuk bergerak dan kemudian percaya berita-berita yang menyudutkan Ahok sekaligus juga Jokowi, di mana PDI-P adalah partai pendukungnya, melalui media sosial. Tidak hanya informasi dan fitnah Hoax, melalui jejaring masjid, mushola, dan Tamasya Al-Maidah, mereka juga melakukan provokasi dengan menggunakan sentimen agama bahwa sebagai umat Islam diharamkan untuk memilih Ahok. Jika mereka bersikeras untuk memilih, ada sejumlah masjid yang memperingati untuk tidak memilihnya. Alih-alih kemudian mencoba mengontrol dan kemudian memotong gelombang kebencian dan brutalitas yang dilakukan selama kampanye Pilkada DKI Jakarta ini, Anies-Sandi justru menunggangi gelombang tersebut. Hal ini terlihat dengan kehadirannya ke markas FPI untuk mendapatkan dukungan suara dan mendatangi peserta Tamasya Al-Maidah yang berkumpul di Masjid Istiqlal.

Memang, tidak mudah untuk mengurai organisasi Islam apa yang ikut melakukan aksi demonstrasi dan melihat pertautan kelompok konservatif Islam yang bergabung. Apalagi mencoba melihat pertautan dan jaringan kelompok Islamisme yang ingin mendirikan negara Islam dengan rangkaian aksi demonstrasi

tersebut. Namun, rangkaian aksi demonstrasi tersebut, khususnya 212 dan 414, dan provokasi melalui kebencian di ruang publik baik secara *online* ataupun *offline* yang mengakibatkan ketakutan kelompok etnis dan agama lain, telah mengokohkan identitas dan ideologi kelompok konservatif ke ruang publik lebih luas dan diterima relative baik. Meskipun sejak era SBY mereka menemukan keleluasaan untuk melakukan tindakan kekerasan berbasis sekretarianisme agama, namun skalanya masih terfragmentasi dan terpisah di daerah-daerah. Melalui sentimen, provokasi, dan fitnah semacam ini akhirnya membuat Ahok kalah dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Alih-alih kealahannya menjadi semacam negosiasi politik yang memungkinkan ia tidak di penjara. Sebaliknya, meskipun secara saksi dan bukti-bukti empiric di pengadilan menguatkan posisi Ahok tidak bersalah yang kemudian membuat Jaksa Penuntut Umum hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua bulan. Sebaliknya, Majelis Hakim memvonisnya melanggar Pasal 156 a huruf a KUHP, berbeda dengan tuntutan jaksa. Ahok pun divonis 2 tahun penjara.

Divonis penjaranya Ahok ini kemudian memunculkan wajah politik harapan sebagai bentuk perlawanan dari melawan ketakutan berwajah agama tersebut. Wajah politik harapan ini bisa dilihat dengan dua dua hal. Pertama, dukungan yang diberikan anggota masyarakat di Jakarta, pelbagai

daerah, dan dunia internasional dengan menyalakan 1000 lilin harapan agar Ahok segera dibebaskan. Kedatangan mereka untuk berkumpul dan menyatakan sikap itu bukan dipicu oleh politik uang, melainkan oleh hati nurani yang merasa ditindas oleh hukum yang seharusnya menegakkan keadilan bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Kedua, tumbuhnya keberanian dari individu masyarakat yang sebelumnya diam dalam melihat kesewenang-wenangan ruang publik dengan menggunakan baju agama dalam melancarkan aksi tujuan politiknya. Politik harapan ini merupakan awal benih-benih solidaritas lintas etnik, agama, dan kelas. Mereka tergerak untuk terlibat karena bagian dari warga negara yang juga memiliki Indonesia, tanah air bersama, dengan ragam agama, budaya, etnik, dan keyakinan (Akmaliah, 2017b).

Di tengah segregasi tajam tersebut inilah jelang peringatan Hari Pancasila, Jokowi mengingatkan kembali mengenai fondasi Pancasila sebagai pemersatu dan fondasi masyarakat Indonesia. Di sini, Pancasila juga kemudian menjadi ideologi kebangsaan di tengah menguatnya konservatisme agama dan juga radikalisme atas dampak dari Pilkada DKI Jakarta tersebut. Pancasila kemudian menjadi diskursus yang kembali diperbincangkan. Jokowi kemudian mengambil langkah tegas dengan membuat dua kebijakan. Pertama, pembubaran HTI melalui Perpu Ormas. Kedua, penguatan ideologi Pancasila melalui pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) dengan

mengangkat Yudi Latief, intelektual publik, yang selama ini memiliki konsentrasi dengan sejarah, konteks, dan nilai Pancasila melalui karya-karyanya. Kebijakan pertama inilah yang kemudian membangunkan sentimen oleh kelompok modernis Islam dengan menganggap bahwa Jokowi sebagai anti-Islam. Di sisi lain, langkah ini justru dinilai tepat bagi kelompok Islam seperti Nahdatul Ulama.

### **Penutup: Menempatkan Pancasila di Tengah Tiga Perspektif**

Penguatan Pancasila sebagai upaya membendung konservatisme agama yang mengarah kepada Islamisme semacam ini, imajinasi Pancasila apa sebenarnya yang coba ditawarkan oleh pemerintahan Jokowi ini? Untuk menjawab hal tersebut tidak mudah. Ini karena, selain UKP Pancasila sebagai institusi baru dalam pemerintahan yang melakukan proses penguatan internal dan strukturasi organisasi. Di sini, saya mencoba memberikan peta perspektif untuk memperkirakan jalan apa yang sekiranya akan ditempuh oleh pemerintahan Jokowi.

Setidaknya, ada tiga perspektif bagaimana keterbentukan bangsa Indonesia. Pertama, melalui mediasi mesin cetak jelang akhir abad kedua puluh yang dimulai oleh Revolusi Prancis. Melalui kapitalisme media cetak ini, orang-orang di negara jajahan merasa tersambung antara satu dengan yang lainnya, khususnya melalui bahasa dan praktik-praktik kebudayaan

serta penindasan yang mereka alami. Keterhubungan melalui bahasa dan praktik kebudayaan yang dimediasi oleh kapitalisme media cetak inilah yang diistilahkan oleh Anderson (2003) sebagai *Komunitas Politik Yang Dibayangkan (Imagined Political Community)*. Dalam konteks Hindia-Belanda, imajinasi kebangsaan dengan melihat kebobrokan praktik-praktik kotor Kolonial Belanda ini justru muncul melalui selebaran, cerpen, dan novel yang ditulis oleh kelompok keturunan Tionghoa. Karya sastra semacam inilah yang dikategorikan sebagai *batjaan liar* (Farid dan Razib, 2008). Tidak berhenti di sini, kelompok-kelompok sekuler ini yang kemudian mendirikan sekolah, dunia pergerakan, dan pelatihan untuk kalangan kelas menengah atas.

Namun, melihat kelompok-kelompok sekuler yang memberikan kontribusi keterbentukan imajinasi kebangsaan atas nama Indonesia saja mengabaikan fakta penting, khususnya mengenai kelompok-kelompok agama yang turut memberikan kontribusi yang sama. Di sini, studi yang dilakukan oleh Laffan mengkoreksi temuan Anderson tersebut. Melalui kajian sejarah dan tulisan-tulisan cendekiawan Muslim yang belajar di Mesir dan Arab Saudi, Laffan mengungkapkan bahwa mereka ini yang terus memperjuangkan Indonesia dan Asia Tenggara sebagai bagian dari imajinasi ummat. Kajian religius nasionalisme ini kemudian diteruskan oleh para sarjana Indonesianis sesudahnya, yaitu Kevin Fogg (2012)

dan Chiara Formichi (2012). Menurut mereka berdua, imajinasi negara Islam dengan tumbuhnya nasionalisme religius Islam sudah ada sejak Kartosuwiryo khususnya sejak tahun 1950-an. Bahkan pada level akar rumput, banyak dari pejuang-pejuang Muslim pada fase revolusi 1945 menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari bentuk jihad dalam Islam. Meskipun ketika Indonesia merdeka, mereka mengalami kegagalan dalam mengusulkan Indonesia sebagai negara Islam. Dengan kata lain, dari ketiga kajian para sarjana ini, kita bisa melihat bagaimana imajinasi nasionalisme religius, khususnya Islam memainkan peranan penting dalam pembentukan kebangsaan Indonesia. Konteks negara Islam dan varian-varianannya inilah yang selalu tumbuh, baik sebagai ide, ucapan, maupun gerakan dalam sepanjang dinamika perjalanan Indonesia, tidak terkecuali hari ini. Imajinasi untuk mendirikan negara Islam inilah, dengan melihat irisan dan keterhubungan Darul Islam dengan kelompok teroris pasca rezim Orde Baru, meminjam istilah Quinton Temby (2010: 3) sebagai kekuatan imajinatif (*imaginative power*).

Alih-alih sebagai negara sekuler dan juga agamis melalui kontribusi masing-masing agensi dalam pembentukan kebangsaan keindonesiaan, dalam proses dinamika kekuasaan selanjutnya, yang terjadi justru munculnya Nasionalisme Berketuhanan. Istilah ini diungkapkan oleh Menchik (2016: 72-73) dengan melihat konteks sejarah,

kemunculan 6 agama yang diakui, dan bagaimana proses birokratisasi itu berjalan dengan menguatkan Indonesia sebagai Agama Berketuhanan. Maksud dari Nasionalisme Berketuhanan ini menurutnya adalah komunitas yang dibayangkan melalui teisme ortodok yang dikontrol dan diatur oleh negara melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi agama di Indonesia. Lebih jauh, komunitas yang dibayangkan semacam ini percaya kepada Tuhan sebagai kebaikan publik yang tumbuh untuk kepentingan individu dan masyarakat. Di sini, nilai-nilai sekuler dan agama diatur atas nama percaya kepada Tuhan yang kemudian ditegakkan oleh birokrasi dan aparatusnya, seperti militer, kepolisian, dan tokoh-tokoh agama. Atas nama Kepercayaan kepada Tuhan, di luar diskursus 6 agama resmi tersebut, kepercayaan selain hal tersebut kerap kali disingkirkan. Di sini, Pancasila kemudian menjadi fondasi dalam Nasionalisme Berketuhanan tersebut.

Dari ketiga perspektif tersebut, saya percaya bahwa Indonesia mengalami dinamika ketiga perspektif tersebut dan tarikan satu dengan yang lainnya. Ketiga perspektif ini memiliki irisan sejarah yang panjang juga di Indonesia, khususnya dalam periode 32 tahun Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Klaim kelompok agama bahwasanya Islam memberikan kontribusi yang penting terhadap keterbentukan Indonesia tidak salah. Begitu juga, kelompok-kelompok sekuler dan nasionalis. Namun, proses birokratisasi cara beragama dengan

menghubungkan diri antara pemeluk agama dan warganegara diatur secara relatif ketat oleh negara sejak Orde Baru yang kemudian distrukturkan melalui regulasi dan agensi yang diwariskan pasca rezim Orde Baru. Dalam konteks ini saya percaya bahwa Pancasila sebagai fondasi Nasionalisme Berketuhanan masih terus dipraktikkan, meskipun pada akhirnya harus meminggirkan kelompok-kelompok minoritas yang rentan, yang dianggap berbeda dari arus massa 6 agama besar di Indonesia dan mazhab serta aliran yang lebih banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, membayangkan Pancasila dipraktikkan seperti rezim Orde Baru melalui tindakan kursif dan sewenang-wenang merupakan kekhawatiran yang ganjil di tengah menguatnya media sosial sebagai suara-suara kritis yang seringkali tidak bisa dikontrol oleh negara.

## Daftar Pustaka

- Akmaliah, Wahyudi dan Khelmy K. Pribadi. 2013. "Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer", *Jurnal Maarif*, Vol. 8, No. 1 — Juli, hlm. 132-153.
- Akmaliah, Wahyudi. 2016. "Indonesian Muslim killings: revisiting the forgotten Talang Sari tragedy (1989) and its impact in post authoritarian regime", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 6, no.1, hlm. 1-34.
- Akmaliah, Wahyudi. 2017. "Hikayat Jonru: Dari Cerpenis Hingga Peternak

Kebencian", *Geotimes.co.id*, 7 Oktober, dikutip dari <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/hikayat-jonru-dari-cerpenis-hingga-peternak-kebencian-1/>, pada 13 Oktober 2017.

Akmaliah, Wahyudi. 2017. "Vonis Ahok dan Tumbuhnya Politik Harapan", *Qureta*, 19 Mei 2017, dikutip dari <https://www.quireta.com/post/vonis-ahok-dan-tumbuhnya-politik-harapan>, pada 13 Oktober 2017.

Anderson, Benedict. *Imagined Community*, London: Verso.

Anonim. 2011. "Hormat Bendera Dinilai Musyrik", *Liputan6.com*, 7 Juni 2011, dikutip dari <http://news.liputan6.com/read/338054/hormat-bendera-dinilai-musyrik>, pada 5 Oktober 2017.

Anonim. 2011. "Tujuh PNS Tolak Hormat Bendera", *Solopos*, 8 Juni 2011, dikutip dari <http://www.solopos.com/2011/06/08/tujuh-pns-tolak-hormat-bendera-101516>, pada 5 Oktober 2017.

Anonim. 2014. "Ahok: Lebih Baik Saya Tidak Jadi Gubernur Daripada Biaya Ormas". *Kompas.com*, 25 September 2014, dikutip dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/09/25/15152111/Ahok.Lebih.Baik.Saya.Tidak.Jadi.Gubernur.daripada.Biaya.Ormas>, pada 13 Oktober, 2017

Anonim. 2014. "Kemendagri Sebut Bansos untuk Ormas Dihapus", *Kompas.com*, 22 Desember 2014, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/22/14465261/>

Kemendagri. Sebut. Bansos. untuk. Ormas. Dihapus, pada 13 Oktober 2017.

Anonim. 2014. "KPU Tetapkan Jokowi Menang Pilpres", *www.bbc.com*, 22 Juli 2014, dikutip dari [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140722\\_kpu\\_hasil\\_pilpres](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres), pada 10 Oktober 2017.

Anonim. 2016. "Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari hingga Ahok menjadi tersangka", *bbc.com*, 17 November 2016, dikutip dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, pada 13 Oktober 2017.

Anonim. 2017. "Ahok Pidato Soal Al-Maidah Warga Pulau Pramuka Tepuk Tangan", 24 Januari 2017, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170124165601-12-188611/ahok-pidato-soal-al-maidah-warga-pulau-pramuka-tepuk-tangan/>, pada 13 Oktober 2017

Anonim. 2017. "Indikator Politik: Masyarakat Puas Dengan Kinerja Ahok", *Tirto.id*, 26 Januari 2017, dikutip dari <https://tirto.id/indikator-politik-masyarakat-puas-dengan-kinerja-ahok-chGj>, pada 13 Oktober 2017

Buehler, Michael. 2011. "Partainya Sekuler, Aturannya Syariah", *Majalah Tempo*, 4 Desember.

Buehler, Michael. 2016. *The Politics of Shari'a Law. Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*, United Kingdom: Cambridge University Press.

Bush, Robin. 2008. "Regional 'Sharia'

- Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom”, dalam Greg Fealy and Sally White (editor), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS.
- Farid, Hilmar dan Razib. 2008. Batjaan liar in the Dutch East Indies: a colonial antipode”, *Jurnal Postcolonial Studies*, Volume 11, hlm. 277-292
- Fealy, Greag. 2016. “dalam Tim Lindsey dan Helen Pausacker (editor), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, London: Routldge
- Fogg, Kevin. 2012. *The Fate of Muslim Nationalism in Independent Indonesia*, Ph.D. thesis, Yale University.
- Formichi, Ciara. 2012. *Islam and the Making the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20<sup>th</sup> Century Indonesia*, Leiden: KITLV; Mano: University of Hawaii Press.
- Kamil, Syukron. 2008. “Perda Syari’ah di Indonesia: Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil dan Minoritas non Muslim”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Serial Terbatas mengenai “Islam, HAM, dan Gerakan Sosial, PUSHAM UII, Yogyakarta, 13 – 14 Agustus.
- Laffan, Michael. 2003. *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds*, London and Newyork: RoutledgeCurzon.
- Menchik, Jeremy. 2016. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*, United Kingdom; Cambrige University Press.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken. 2011. *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, Leiden: KITLV Press.
- Rapsadi. Irsyad. 2017. “Catatan Satu Dasarwarsa Pengukuran dan Pemantauan Kebebasan Beragama di Indonesia, dalam Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Abidin Bagir, Irsyad Rafsadi (editor), *Kebebasan Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.
- Robinson, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*, London: Routledge.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. 2014. *Explaining Collective Violence in Contemporary Indonesia: From Conflict to Cooperation*, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Temby, Quinton. 2010. “Imagining an Islamic State in Indonesia: From Darul Islam to Jemaah Islamiyah”, *Jurnal Indonesia*, 89 (April), hlm. 1-36.